

KORUPSI, DEMOKRASI DAN KAPITALISME: SEBUAH MANIFESTO BAGI GERAKAN SOSIAL ANTI KORUPSI

Donny Ardyanto

Abstract

As any article on corruption in Indonesia, this article is also in line with the idea that corruption taken here is extremely big and having infected the society so severely. Owing to that, the writer insists on seeing the strategic agenda of corruption enforcement and prevention.

The writer also in favor of one element of that agenda, that ito form a confederation of non governmental organization having specific focus on corruption enforcement and prevention.

Pendahuluan

Gerakan mahasiswa 1998, sebagai sebuah titik kulminasi dari sejarah perlawanan mahasiswa terhadap rejim orde baru, melantangkan korupsi sebagai salah satu sumber dari ketertindasan rakyat selama ini. Persoalan-persoalan yang sebelumnya hanya diteriakkan oleh segelintir orang seperti pencabutan dwi fungsi ABRI, penolakan terhadap 5 paket UU politik dan amandemen UUD 1945, kemudian menjadi isu bersama dan dilemparkan dalam satu gagasan besar: REFORMASI!

Sejak saat itu korupsi dianggap sebagai salah satu isu penting, di samping isu pelanggaran HAM, sistem politik dan dwi fungsi ABRI/TNI. Semua unsur masyarakat, mulai dari birokrat, tukang becak, politisi, anggota DPR, aparat penegak hukum hingga presiden tiba-tiba menyatakan dirinya anti korupsi dan hendak menghapus segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dari bumi Indonesia ini.

Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (yang seharusnya melin-

dungi kepentingan umum) untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan itu muncul karena tidak adanya atau lemahnya kontrol terhadap kekuasaan. Hal mana identik dengan ungkapan terkenal dari Lord Acton, bahwa "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut dipastikan korup" (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*). Untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang otoriter dan menindas, dilakukan upaya kontrol terhadap kekuasaan dengan membangun kemampuan dan kekuatan masyarakat (sistem demokrasi).

Namun dalam perkembangannya, demokrasi hanya dipahami pada tingkat formal. Sebuah negara dianggap sebagai negara demokratis apabila ada pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif; pemilu yang dilakukan secara rutin; dan diterapkannya sistem multi partai.

Selama era orde baru, Indonesia memang menjalankan mekanisme "demokrasi" tersebut. Ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif, ada pemilu setiap lima tahun sekali, ada pula tiga parpol

peserta pemilu. Namun apakah itu demokrasi yang kita cita-citakan?

Tulisan ini pada dasarnya merupakan manifesto dari Perhimpunan Rakyat Jakarta untuk Pemberantasan Korupsi (berantaS) yang dideklarasikan pada tanggal 18 Septemebr 2001.

Sistem politik dan korupsi

Demokrasi memang berbanding lurus dengan pemberantasan korupsi. Namun ada realitas bahwa di negara-negara yang dianggap demokratis, tingkat korupsinya relatif tinggi (contohnya: India, Jamaika dan Columbia). Bahkan sebaliknya, di negara yang dianggap tidak demokratis/otoriter seperti Chile, Malaysia dan Taiwan misalnya, tingkat korupsinya relatif rendah.

Apa yang tergambarakan dari tabel di bawah ini (Transparency International, 1999) menunjukkan bahwa ada faktor lain yang turut memberi sumbangan bagi terbukanya peluang korupsi di suatu negara. Faktor-faktor lain di luar otoritarianisme yang memberi peluang bagi korupsi itulah yang perlu kita elaborasi lebih jauh.

**Tabel
Sistem Politik dan Indeks
Persepsi Korupsi**

COUNTRY	CPI Rank 1998	Corruption Perception Index (CPI) 1998	ESTABLISHED DEMOCRACY (Lijphart Definitions)
Singapore	7	7	?
Chile	20	6,8	NO
Malaysia	29-31	5,3	NO
Taiwan	29-31	5,3	NO
Jamaica	49	3,8	YES
India	66-68	2,9	YES
Colombia	79	2,2	YES

Indonesia	80	2,0	?
-----------	----	-----	---

(Dirangkum dari *Transparency Interantional Annual Report 1999* dan *International IDEA Drafts Political Finance Handbook* yang disusun oleh *International IDEA*)

Secara mendasar, setiap orang punya potensi untuk melakukan kejahatan. Juga, setiap orang punya potensi untuk haus akan kekuasaan. Berdasarkan itu, pemberantasan korupsi (dan juga kejahatan-kejahatan yang lain) terbukti tidak bisa berjalan efektif apabila dilihat sebagai persoalan yang bersifat personal seperti halnya bila kita melihat maling ayam atau copet.

Jika kita melihatnya sebagai persoalan personal, maka pemberantasan dan pencegahannya cukup dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka, bahkan sampai ada yang dibakar oleh massa.

Namun tetap saja muncul maling-maling ayam yang lain dan juga copet-copet yang lain. Artinya, ada persoalan yang bersifat struktural di situ, mengingat dengan mekanisme penghukuman yang berat sekalipun, mereka tetap melakukan kejahatan. Sebab mereka memang tidak punya pilihan lain, karena bila mereka tidak *nyopet*, mereka bakal mati kelaparan.

Argumentasi ini tidak dalam kerangka memberikan justifikasi terhadap tindak kejahatan, namun dalam konteks melihat lebih jauh akar dari persoalan-persoalan kejahatan tersebut.

Akar dari munculnya korupsi sebenarnya tidak jauh berbeda. Dalam konteks korupsi yang kecil-kecilan (*petty corruption*), mereka melakukannya dalam kerangka untuk mempertahankan diri agar bertahan hidup karena gaji yang pas-pasan.

Sedangkan dalam korupsi yang besar (*grand corruption*), pelakunya berusaha untuk terus mengakumulasi kekayaan, karena dengan kekayaan (penguasaan atas sumber daya ekonomi) tersebut mereka dapat

mempertahankan bahkan meningkatkan kekuasaan politik mereka.

Dalam kasus *petty corruption*, akar korupsi adalah ketidakadilan (yang dalam bahasa eufimisme orde baru disebut sebagai kesenjangan sosial) dalam struktur sebuah masyarakat. Sementara dalam kasus *grand corruption*, korupsi terjadi karena adanya intensi untuk terus melakukan akumulasi kekayaan (yang berimplikasi pula pada penguatan kekuasaan).

Namun ada benang merah di antara keduanya, yaitu bahwa persoalan-persoalan ekonomi-politik merupakan akar terjadinya korupsi.

Ketidakadilan dan kecenderungan orang untuk terus melakukan akumulasi kekayaan (tanpa memperdulikan proses akumulasi kekayaan tersebut), selalu terjadi dalam struktur masyarakat yang kapitalistik. Disitu, logika utama dalam persoalan ekonomi adalah bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya.

Kepentingannya jelas: untuk mengakumulasi modal. Sehingga menjadi tidak penting apakah dalam melakukan akumulasi modal tersebut terjadi penindasan terhadap buruh (dengan dibayar semurah-murahnya) ataukah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan (untuk menghindari biaya tambahan dalam memproses limbah industri agar aman bagi lingkungan).

Struktur masyarakat ini juga melahirkan nilai-nilai penghargaan terhadap orang lain berdasarkan kekayaannya semata. Nilai-nilai tersebut yang membuat orang cenderung untuk terus memperkaya diri dan tidak memperdulikan orang lain.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai korupsi dan demokrasi, bertemunya sistem demokrasi dengan praktek-praktek ekonomi kapitalisme,

melahirkan ketidaksesuaian yang mengakibatkan korupsi ekonomi-politik.

Pembahasan yang komprehensif mengenai korelasi antara korupsi, kapitalisme dan demokrasi bisa dilihat di buku John Girling (1997),

Ada dua karakteristik utama dari ekonomi-politik korupsi, yaitu adanya sumbangan dana dari perusahaan (*corporate funding*) bagi proses-proses politik dan penetrasi nilai-nilai pasar dalam kehidupan sosial dan politik. Ketidaksesuaian, bahkan kotradiksi tersebut terjadi karena sistem demokrasi bermaksud untuk dapat mengakomodasi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum (*public*). Sementara itu, sistem ekonomi dalam kapitalisme selalu memperjuangkan kepentingan-kepentingan pribadi (*private*).

Artinya, struktur masyarakat kapitalis memang melahirkan nilai-nilai *fetishism*. Dalam bahasa yang biasa/lazim di pakai adalah masyarakat yang materialistis, yaitu masyarakat selalu mengejar materi/harta benda. sehingga menimbulkan ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum yang lemah (secara ekonomi maupun politik, seperti buruh, petani, masyarakat adat, dsb), Saat bertemu dengan sistem demokrasi, nilai-nilai tersebut juga melahirkan kontradiksi-kontradiksi.

Arti selanjutnya, sebagai sebuah persoalan yang sudah bersifat struktural seperti halnya persoalan-persoalan lain yang menimpa rakyat Indonesia, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya berharap kepada kalangan birokrat, aparat penegak hukum bahkan presiden sekalipun. Adapun penyebabnya adalah, korupsi sangat dekat dengan kekuasaan. Orang yang berkuasa punya kecenderungan sangat besar untuk korup.

Dengan pemahaman seperti itu, pemberantasan korupsi tidak bisa bersifat *top down* (dari atas ke bawah), akan tetapi harus *bottom up* (dari bawah

ke atas). Artinya, pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya, harus melibatkan peran serta langsung dari rakyat.

Dengan melihat korupsi di Indonesia yang sudah bersifat struktural, maka secara umum kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penyebab utama korupsi adalah:

Pertama, tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan. Termasuk di dalamnya tidak dijalkannya nilai-nilai dasar demokrasi. *Kedua*, ketidakadilan dan ambisi untuk mengakumulasi kekayaan, yang merupakan bagian dari struktur kapitalisme.

Agenda besar pemberantasan korupsi

Oleh karena itu, agenda besar dari upaya pemberantasan korupsi adalah: *Pertama*, mengembalikan kembali kekuasaan ke tangan rakyat, sehingga mekanisme kontrol yang bersifat *bottom up* dapat terbangun. *Kedua*, menghapus ketidakadilan dengan memperkuat basis-basis ekonomi rakyat, sehingga rakyat kembali berdaya baik secara ekonomi maupun politik.

Untuk bisa memenuhi agenda besar tersebut, ada beberapa hal yang harus dirubah. Perubahan-perubahan yang harus dilakukan antara lain adalah:

1. Perubahan politik, yaitu seperti disebutkan di atas dengan mengembalikan kekuasaan kembali di tangan rakyat.
2. Perubahan ekonomi, juga sudah disebutkan di atas, yaitu memperkuat basis-basis ekonomi rakyat.
3. Perubahan sosial-budaya, yaitu menghapus nilai-nilai feodalisme dan paternalistik yang masih berkembang dan membangun budaya yang lebih egaliter dan demokratis.

Sedangkan untuk bisa melakukan perubahan tersebut, ada dua level perjuangan yang perlu diupayakan,

yaitu pada level kebijakan dan level masyarakatnya sendiri. Di level kebijakan, kita harus mengupayakan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara memperkecil kesempatan orang untuk melakukan korupsi. Hukum harus diperkuat, demikian juga penegakkannya harus secara tegas memberikan hukuman yang setimpal kepada koruptor.

Sistem politik juga harus memberikan kebebasan politik kepada rakyat, sehingga kekuasaan kembali ke tangan rakyat. Pemilu harus dilaksanakan dengan demokratis, jujur dan adil. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan distribusinya pun harus merata.

Untuk bisa mencapai tujuan-tujuan di level kebijakan di atas, biasanya kita mengharapkan adanya *political will* dari pemerintah. Masalahnya, realitas menunjukkan bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Sebuah produk kebijakan merupakan hasil dari proses politik, artinya ada *bargaining* (tawar menawar) politik di situ. Apabila rakyat hendak memperjuangkan kepentingannya, maka rakyat harus memperkuat pula posisi tawarnya terhadap pemerintah.

Secara obyektif, kita adalah bagian dari kelompok marjinal dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan. sehingga kemampuan kita untuk mendorong supaya ada *political will* dari pemerintah untuk melaksanakan agenda-agenda tersebut di atas juga sangat minim. Oleh karena itu, sebagai bagian dari elemen rakyat, agenda utama kita tetap pada bagaimana memberdayakan atau memperkuat rakyat.

Untuk memberdayakan rakyat, kita harus ingat peribahasa yang sering kita dengar dari dulu, "Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh". Untuk memberdayakan rakyat, harus ada persatuan. Untuk menciptakan persatuan, harus ada sebuah organisasi

yang mempersatukan. Dan organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik, tentunya harus ada tujuan yang jelas. Dan semua itu mensyaratkan adanya kesadaran untuk berorganisasi dan kemampuan menjalankan program-program organisasi, artinya rakyat juga harus terdidik. Singkatnya, dasar-dasar bagi penguatan rakyat adalah rakyat yang terdidik dan terorganisir.

Rakyat yang demikian dalam sebuah gerakan rakyat anti korupsi serta strategi pemberantasan korupsi yang bersifat *bottom up* akan melahirkan mekanisme yang demokratis.

Mekanisme kontrol dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui organisasi-organisasi anti korupsi di mana mereka terlibat secara aktif di dalamnya. Dengan begitu, demokrasi sejati akan lahir dari rakyat sendiri.

Konfederasi organisasi anti korupsi

Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang sangat luas. Jaringan kekuasaan yang korup juga telah merasuki seluruh wilayah Indonesia, dari tingkat RT, RW, Kelurahan hingga pemerintah pusat. Artinya, problem korupsi yang harus kita basmi sudah meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga setelah organisasi-organisasi rakyat anti korupsi terbentuk, harus dipersiapkan juga agenda untuk mempersatukan organisasi-organisasi rakyat anti korupsi tersebut dalam sebuah konfederasi organisasi anti korupsi.

Konfederasi tersebut merupakan representasi dari organisasi-organisasi rakyat anti korupsi di seluruh Indonesia, yang bertugas untuk mengkoordinir kerja-kerja penguatan rakyat untuk pemberantasan korupsi dan menyusun agenda-agenda strategis bagi gerakan rakyat untuk pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu dikembangkan sebagai berikut::

Pertama, adanya sebuah organisasi anti korupsi yang berpegang pada garis gerakan sosial anti korupsi harus membangun basis gerakan dengan konstituen yang jelas.

Kedua, sebuah organisasi anti korupsi harus menyusun dan melakukan kampanye dan pengorganisasian secara massif dan meluas, serta mengangkat kasus-kasus korupsi yang secara langsung merugikan masyarakat sehingga masyarakat juga bisa secara langsung terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Ketiga, sebuah organisasi anti korupsi harus memiliki mekanisme kontrol yang demokratis, baik di tingkat internal maupun eksternal, yang akan dilakukan oleh komunitas-komunitas anti korupsi di tingkat basis, serta anggota-anggota dari organisasi anti korupsi tersebut.

Keempat, organisasi-organisasi anti korupsi yang ada di seluruh Indonesia di masa depan hendaknya mulai memperkuat jaringan kerja samanya melalui pembentukan semacam konfederasi organisasi anti korupsi Indonesia, dengan struktur dan pembagian kerja yang adil dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Girling, J.
1997 **Corruption, Capitalism and Democracy**, Routledge, London and New York
- 1999 **Transparency International Annual Report**
- International IDEA, Political Finance Handbook, drafts**



Jurusan Kriminologi
Program Ekstensi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Indonesia